

# REKONSTRUKSI PERAN ISLAM SEBAGAI AGAMA *PROPETHIC* DI INDONESIA

Naupal

Departemen Filsafat Universitas Indonesia

## *Abstract*

*The function of prophetic religion in essence is the first and foremost role of islam as a religion. Prophet Muhammad struggle not only as a propagator toward faith for Allah, but also as a liberator for the people from violence and injustice. During the war for independence in Indonesia, Islam also took the part as prophetic religion, which consisted as a foundation for spiritual guidance, and also the base for mass mobilization toward charge and independence against the presor. A critique made for how islam has evaluated in Indonesia now is the tendency to reduce the role of Islam close to status quo, and formalist syariah, resulting myriad of problems, such as injustice and dehumanization. This academic writing attempts to investigate the role of Islam as a prophetic religion in Indonesia. In order to achieve the ideal Indonesian society, society that has the notion of tolerance, openness, egalitarian and democratic. Through a social and cultural transformation as a way of realizing a process towards a civilized Islamic society.*

**Keywords:** *Prophetic religion, priestly religion, theology, social and cultural transformation, education, democracy, tolerance.*

## Abstrak

*Peran agama prophetic ini hakikatnya merupakan peran pertama dari Agama Islam. Perjuangan Nabi Muhammad sebenarnya bukan hanya menyebarkan keyakinan atau iman kepada Allah SWT, tetapi juga sebagai kekuatan pembebas dari segala bentuk kekerasan dan ketidakadilan. Pada waktu perang kemerdekaan di Indonesia, agama Islam juga mengambil peran sebagai prophetic religion, yaitu di samping sebagai fondasi spiritual bagi pemeluknya, agama Islam juga berkekuatan memobilisasi massa untuk menggerakkan perubahan dan perjuangan melawan kezaliman penjajah. Kritik terhadap agama Islam di Indonesia sekarang ini adalah reduksi atas peran agama Islam sebagai penjaga status quo, dan formalisme syari'ah, sehingga dampaknya adalah menimbulkan problem ketidakadilan dan dehumanisasi. Tulisan ini berusaha mengkaji peran Islam sebagai agama propethic di Indonesia yang mencita-citakan terwujudnya masyarakat Indonesia yang ideal, yaitu masyarakat yang toleran, terbuka, egaliter, dan demokratis lewat suatu transformasi sosial budaya secara sadar sebagai proses menuju masyarakat Islam yang beradab (civilized).*

*Kata Kunci: Agama profetik, priestly religion, teologi, transformasi sosial budaya, pendidikan, revolusi mental, demokrasi, toleransi.*

## Pengantar

Secara historis, agama Islam di Indonesia memiliki citra yang baik. Masuknya Islam di Indonesia dilakukan dengan cara damai, dan mampu beradaptasi dengan budaya lokal, sehingga menampilkan wajah yang ramah dan toleran. Di tengah-tengah pluralitas budaya dan kepercayaan, Islam mampu mengadopsi budaya lokal, seperti yang dilakukan oleh para Wali Songo.

Pada waktu perang kemerdekaan, agama Islam mengambil peran sebagai *propethic religion*, yang menjadi model mobilisasi massa untuk menggerakkan perubahan dan perjuangan melawan kezaliman penjajah. Dalam perkembangan berikutnya, jiwa besar ditunjukkan oleh para pendiri bangsa yang dengan rela—demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)—meng-

hapuskan 7 kata dalam Piagam Jakarta, 22 Juni 1945, yaitu dengan kewajiban melaksanakan Syariat Islam bagi pemeluknya. Dalam konteks ini, jelas agama Islam hadir sebagai rahmat bagi semua bangsa Indonesia, bukan menjadi penghalang bagi keutuhan negara.

Pasca kemerdekaan, peran agama dalam sejarah kebangsaan Indonesia masih sangat strategis. Keberhasilan program keluarga berencana, transmigrasi, dan swasembada pangan tidak bisa dilepaskan dari pengaruh pemuka agama. Pada masa pemerintahan SBY, para tokoh lintas agama, seperti Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Mgr Martinus Situmorang, Ketua Persatuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Pendeta Andreas Yewangoe, Buya Syafi'i Ma'arif, Franz Magnis Suseno, KH Salahuddin Wahid, dan Biku Sri Pannyavaro melakukan kritik tajam atas pemerintahan SBY yang dianggap banyak melakukan kebohongan publik.<sup>1</sup>

Mengkaji dan mendalami peran Islam sebagai agama *prophetic* di Indonesia pada dasarnya membawa kita untuk mendambakan dan mencita-citakan masyarakat Indonesia yang ideal, yaitu masyarakat yang manusiawi, terbuka, egaliter, dan demokratis lewat suatu transformasi sosial budaya secara sadar. Tulisan ini akan fokus mengangkat pentingnya peran dan misi Islam sebagai agama *prophetic* di negara kita, Indonesia, sehingga diharapkan akan terjadi transformasi sosial sebagai proses menuju masyarakat Islam yang beradab (*civilized*).

### Misi Islam sebagai Agama *Prophetic*

Hakikatnya agama dalam kenyataan empiris bisa menjadi sumber konflik maupun harmoni. Dalam masyarakat primitif, agama diciptakan untuk menyatukan individu dan membentuk masyarakat atas dasar solidaritas mekanis. Agama merupakan representasi kolektif manusia,<sup>2</sup> sehingga adanya gejala sosial seringkali ditafsir-

1 Lihat Fajar Metro News, [www.fajar.co.id](http://www.fajar.co.id), diakses pada 01:41 WITA, Selasa, 11 Januari 2011.

2 Lihat Malcolm B. Hamilton, *The Sociology of Religion: Theoretical and Comparative Perspective*, London and New York: Routledge, 1995, hal. 97.

kan dengan perspektif religious. Lebih-lebih, pada masyarakat pra-modern yang selalu merujuk kepada agama untuk mencari jawaban atas kompleksitas sosial yang rumit.

Dalam khazanah ilmu-ilmu sosial modern, agama ternyata tidak dikaitkan dengan konflik, melainkan lebih kepada integrasi dan harmoni. Emile Durkheim, salah seorang perintis ilmu sosiologi modern abad ke-19, berdasarkan penelitian yang dituliskannya dalam *The Elementary Forms of the Religious Life* (1912) menemukan bahwa hakikat agama pada fungsinya sebagai sumber dan pembentuk solidaritas mekanis. Ia beranggapan bahwa agama adalah suatu pranata yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengikat individu menjadi satu kesatuan melalui sistem kepercayaan dan ritus. Lewat simbol-simbol yang sifatnya suci, agama mengikat orang-orang ke dalam berbagai kelompok masyarakat. Singkatnya dapat dikatakan bahwa dalam sebuah masyarakat dapat dipastikan terdapat nilai-nilai yang dikuduskan (disakralkan). Yang dikuduskan mengkondisikan anggota masyarakat untuk tunduk, sementara yang profan mengarah pada hal yang bersifat materi dan duniawi.

Pembedaan pada yang sakral dan yang profan adalah hakikat beragama dan ada dalam setiap agama. Dalam perkembangannya, karena kebutuhan untuk menciptakan harmoni dalam kekuasaan, hal-hal yang profan dikuduskan, seperti yang terjadi pada abad pertengahan di dunia Barat. Ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, bahkan negara harus mendapat legitimasi dari institusi agama. Akibatnya, terjadilah dehumanisasi, kepicikan, bahkan agama dan negara kebal atas kritik. Ayat-ayat dalam Surat Rasul Paulus kepada umat di Roma pasal 13 misalnya menyatakan bahwa, Tuhanlah yang menobatkan para penguasa. Surat Rasul Paulus digunakan untuk mendukung hak ilahi raja-raja terhadap gerakan-gerakan demokratis, sehingga dorongan untuk menentukan nasib sendiri secara sosial politik berbenturan dengan sistem sosial politik yang dinyatakan berasal dari Tuhan. Secara umum *status quo* didukung oleh keyakinan tentang kebaikan dan kemahakuasaan Tuhan: apapun itu, itu adalah baik. Melawan keyakinan yang sangat mendalam ini dianggap menentang kehendak Tuhan.<sup>3</sup> Konflik antara

---

3 Dikutip dari David Ray Griffin, *God and Religion in the Postmodern World*,

agama dengan sains juga terlihat dalam kisah Galileo yang dianggap bersalah, karena mendukung Teori Kopernikus bahwa, bumi beredar mengelilingi matahari. Galileo dicerca dan ditempatkan di dalam suatu rumah tahanan selama tujuh tahun sampai akhirnya ia digantung. Penguasa gereja sudah lama mengetahui bahwa esensi argumen Galileo benar dan bahwa doktrin gereja itu sendiri didasarkan atas asumsi yang salah.<sup>4</sup>

Dalam sejarah Islam, persekutuan antara agama dan politik ini tampak dari asal-usul dua ilmu yang berkembang pada awal perkembangan Islam. *Pertama* adalah ilmu kalam atau teologi. Aliran pemikiran yang muncul misalnya, aliran Khawarij, Syiah, dan Murjiah mempunyai latar belakang politik. Aliran khawarij adalah respon yang mewakili perlawanan suku Badui menentang hegemoni kekuasaan suku Quroisy. Aliran Syiah mewakili dukungan Ali dalam kursi kekhalifahan; dan aliran Murjiah mewakili kepentingan dinasti yang ingin berkuasa, khususnya dinasti Umayyah di lingkungan Suku Quroisy.

Demikian pula ilmu fiqh yang merumuskan hukum keagamaan di berbagai bidang guna mendukung kekuasaan dan pemerintahan. Elit keagamaan bersedia melakukan dukungan terhadap kekuasaan, karena mereka membutuhkan kekuasaan untuk menegakkan paham kelompok mereka, seperti yang terjadi belakangan dalam kasus pembentukan kerajaan Saudi Arabia yang merupakan wujud absolutisme. Dalam kasus ini otoritas keagamaan yang sedang dibangun oleh ulama Muhammad bin Abdul Wahab—yang saat itu masih banyak ditentang—mendukung dinasti; sedangkan aliran keagamaan Wahabisme memperoleh perlindungan dan dukungan politik dari elit penguasa. Kerajaan ini adalah kerjasama antara aliran keagamaan Wahabi dengan dinasti Ibn Saud. Kerajaan mendapatkan legitimasi agama dari aliran wahabi karena akan mendukung kerajaan, sementara aliran keagamaan Wahabi

---

(terj .A. Gunawan Admiranto: Tuhan dan agama dalam dunia Posmodern), Yogyakarta: Kanisius, 2005, hal. 81.

4 Permohonan maaf dilakukan pada bulan Oktober 1992, ketika Paus Paulus Yohanes II menerima laporan temuan tentang komisi Galileo. Untuk lebih jelas, lihat Kimbal, *Kala Agama Menjadi Bencana*, (terj. Nurhadi), Bandung: Mizan, 2003, hal. 314.

mendapat perlindungan dan dukungan politik dari kerajaan. Hasilnya adalah sebuah absolutisme yang merupakan gabungan antara otoritas keagamaan yang absolut dengan otoritas politik yang juga absolut.

Begitulah persoalan teologi dan fiqih telah melembagakan dan melahirkan berbagai kelompok dan madzhab yang menimbulkan konflik dan perseteruan yang tidak sekedar memunculkan bentuk pemikiran, tetapi juga korban nyawa. Setiap mazhab dan kelompok mengkafirkan kelompok lain, atau menganggapnya sesat. Akibatnya posisi manusia semakin termarginalkan. Madzhab dan kelompok telah mapan berlindung di bawah rezim penguasa dan mentahbiskan sistem mazhabnya sebagai ideologi negara.

Dalam kasus di Indonesia, kehadiran kelompok-kelompok fundamentalis, baik dalam bentuk organisasi massa,<sup>5</sup> seperti HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), FPI (Front Pembela Islam), atau dalam bentuk lembaga Pendidikan, seperti Pesantren al-Mukmin, dan Pesantren al-Islam, Jama'ah Salafiah telah membentuk *image* baru terhadap agama Islam, sebagai agama yang tidak toleran, anti demokrasi, dan cenderung kepada kekerasan. Apalagi ajarannya bersifat eksklusif, tidak cair, dan menyesatkan kelompok lain yang tidak sepaham. Padahal seharusnya semangat dari ajaran agama secara alamiah adalah menginformasikan tentang semangat revolusi kemanusiaan, bukan revolusi ketuhanan. Hal ini ditandai dengan gerakan pembaharuan menuju pada suatu kebangkitan nilai keuniversalsan dan nilai kemanusiaan seperti yang digagas oleh Hassan Hanafi.<sup>6</sup>

Dari pengalaman sejarah di atas, peran agama sebagai lembaga kependetaan, walaupun menciptakan masyarakat yang harmoni di satu sisi, tapi di sisi lain telah membawa malapetaka besar terhadap problem kemanusiaan, kebebasan, bahkan agama mengungkung pengembangan ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Agama yang ta-

5 Lihat Afadlal, dkk, *Islam dan Radikalisme di Indoensia* (ed. Endang Turmudi, Riza Sihbudi), Jakarta: LIPI Press, 2005.

6 Lihat Hassan Hanafi, *Mina l-aqidah ila tsawrah, Vol. 1*, Kairo: Maktabah Madbouli, 1988, hal. 59-66.

dinya bersifat teologis menjadi ideologis,<sup>7</sup> akhirnya agama-agama melembaga secara formal dan terorganisasi. Menurut Fromm ketika agama melembaga, ia berpotensi menjadi otoriter terhadap manusia konkrit yang dapat menyumbangkan situasi dehumanisasi di satu sisi,<sup>8</sup> dan sisi lain peran agama direduksi pada pemeliharaan harmoni yang bersifat mekanistik lewat penyelenggaraan ritus-ritus dan justifikasi harmoni.

Sekarang kita di Indonesia membutuhkan bukan peran agama sebagai lembaga kependetaan (*priestly religion*), tetapi agama yang berperan sebagai *prophetic religion*. Menurut Kenneth Boulding, seperti yang dikutip oleh Dawam Rahardjo,<sup>9</sup> Agama bisa berperan lebih aktif sebagai kekuatan pembebas, seperti terjadi pada masa awal perkembangannya, ketika teologi yang dikembangkan adalah untuk merespons persoalan-persoalan konkrit yang dihadapi oleh masyarakat. Peran agama *prophetic* ini hakikatnya merupakan peran pertama dari agama Islam. Perjuangan Nabi Muhammad sebenarnya bukan hanya menyebarkan keyakinan atau iman kepada Allah SWT, walaupun tauhid adalah dasar dari seluruh ajaran Nabi Muhammad. Ketika Muhammad mulai diutus sebagai Nabi atau Rasul, setelah mendapat wahyu, sebagian masyarakat Arab sebenarnya telah mengenal Tuhan Yang Maha Esa, yang disebut sebagai penganut agama Hanif (penganut agama Ibrahim). Orang-orang Yahudi juga percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, demikian juga agama Kristen. Itulah sebabnya wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad adalah membawa pesan pada kebudayaan baru, kebudayaan membaca (surat al-‘Alaq), kebudayaan anti diskriminasi dan anti rasial, yaitu kebudayaan yang memuat persamaan

---

7 Di samping ada kata ideologi, juga ada kata “ideologis”. Kata ini selalu berkonotasi negatif, yaitu kemutlakannya tidak mengizinkan orang mengambil jarak dengannya, dan menganggap gagasan kelompoknya yang paling benar dan mutlak. (Lihat, Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia, 1999, hal. 367).

8 Penggambaran tentang agama otoritarian dan agama humanistik dapat dilihat dalam buku Erich Fromm, *Religion and Psychoanalysis*, New York: Vail-Ballou Press Ins., 1997, hal. 19-64.

9 Dawam Raharjo, *Masyarakat Madani: Agama, kelas menengah, dan Perubahan Sosial*, LP3S, LSAF, 1999, hal 186.

(*musawat*), dan kemerdekaan dari perbudakan (*hurriyat*).

Menurut Fromm, seperti yang dikutip oleh M. Dawam Rahardjo, ada beberapa ciri misi kenabian (*prophecy*). *Pertama*, Nabi selalu mengabarkan tujuan hidup menuju Tuhan, sehingga dengan mendekati diri kepada Tuhan, kehidupannya menjadi lebih manusiawi; *Kedua*, cara Nabi untuk menyadarkan manusia agar bisa mengatur perilaku umatnya berangkat dari kesadarannya masing-masing, bukan dengan pemaksaan; *Ketiga*, Nabi mewakili hati nurani rakyat banyak dan melakukan protes terhadap tindakan penguasa yang zalim; *Keempat*, Nabi tidak hanya mengajarkan keselamatan pribadi (*personal salvation*), tetapi juga keselamatan masyarakat; *Kelima*, Nabi mengilhami kebenaran.<sup>10</sup> Dengan demikian, cermin agama *prophetic* adalah teologi yang mengacu kepada nilai-nilai universal, seperti keadilan, kesejahteraan, dan menyadari peran kemanusiaannya.

Acuan tersebut menciptakan sikap kritis terhadap lingkungan, termasuk alam pemikiran keagamaan yang bersifat eksklusif. Agama akan bersikap *prophetic* jika pada saat bersamaan merespon keadaan, dan mereinterpretasi wahyu Allah sesuai dengan situasi dan kondisi (waktu dan tempat). Kecenderungan seperti ini akan melahirkan teologi kontekstual yang bisa membebaskan masyarakat dari belenggu mitos kesakralan yang telah dipandang mapan. Dengan sendirinya teologi semacam ini akan melawan peran agama sebagai lembaga kependetaan (*priestly religion*) yang berorientasi pada *status quo* demi menjaga keamanan yang sudah ada.

Kajian sejarah dan otokritik ini memberikan pengertian mengenai paradigma mengintegrasikan agama dan negara dalam Islam sulit dibongkar sampai ke akarnya. Oleh karena itu, dibutuhkan revolusi pemikiran yang akan menyadarkan bahwa hakikatnya misi Nabi Muhammad dan misi Islam adalah misi kemanusiaan. Islam memang tidak bisa dilepaskan dari politik, dan gerakan Islam perlu terus menampilkan wacana keagamaan di arena publik. Hal ini sebenarnya tidak menjadi persoalan, karena Islam punya potensi untuk menjadi agama publik. Namun, orientasinya tidak bisa bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan asas-asas

---

10 *Ibid*, hal. 195.



HAM. Jika ingin menemukan tokoh panutan di zaman Nabi dan sahabat, maka tokohnya adalah Abu Zar al-Ghifari yang menentang hegemoni Quroisy dan memperjuangkan hak-hak rakyat. Abu Zar sering disebut orang sebagai tokoh sosialisme Islam, Islam Kiri (versi Hassan Hanafi) yang terus memperjuangkan hak-hak rakyat, yang dewasa ini diwacanakan sebagai hak asasi manusia dan hak-hak sipil sebagai inti dari liberalisme.

Sebagai syarat ke arah pembaharuan itu, perlu dilakukan sekularisasi yang membedakan (bukan memisahkan) wilayah agama sebagai wilayah privat yang sakral, dan wilayah politik atau negara sebagai wilayah publik yang profan. Pemisahan perlu dilakukan sebagai jalan tengah dari dua ekstrem yang radikal untuk menghindari persekutuan antara otoritas keagamaan dan otoritas politik yang akan membentuk absolutisme itu. Selain itu wacana dan aktivitas politik keagamaan perlu diubah dari orientasinya sebagai *status quo* kekuasaan, menjadi keberpihakan kepada kewargaan. Orientasi ini diperlukan untuk menghindarkan diri dari penggunaan agama oleh elit politik untuk memperoleh dan membangun kekuasaan, dan sebaliknya memberdayakan rakyat untuk bisa memperoleh dan menggunakan hak-haknya atas kesejahteraan yang seluas-luasnya. Dengan demikian, negara dan rakyat akan berkembang atas dasar prinsip demokrasi dan penghargaan pada HAM.

Perspektif ini akan membawa pada wacana bahwa politik Islam di Indonesia tidak lagi mengarah pada membangun negara Islam dalam arti sempit, atau penerapan formalisme syariat Islam, yaitu negara bukan lagi sebagai instrumen penerapan syariah Islam, tetapi negara Islam dipahami sebagai tatanan masyarakat yang damai. Negara Islam dipahami sebagai *darus salam* (negara damai) yang dilawankan dengan *darul harbi* (negara perang). Di sini fungsi negara Islam adalah menciptakan kesejahteraan rakyat, yang diawali dengan pengentasan kemiskinan dan kebodohan, serta pemberantasan ketidakadilan dan kezaliman. Sebagai negara sejahtera, negara perlu didukung oleh sistem ekonomi Islam yang diartikan sebagai sistem ekonomi kesejahteraan sosial, sebagaimana yang disebut dalam UUD '45. Dengan demikian, negara Islam dan ekonomi Islam merupakan dua konsep kembar. Konsep ekonomi Islam

yang dilandasi gotong royong, solidaritas kerjas sama, saling membantu, dan kekeluargaan (*ta'awun*) sangat cocok dengan gagasan sistem ekonomi Pancasila yang terdapat dalam pasal 33 UUD '45.

Gerakan Islam di Indonesia hakikatnya punya potensi dan peluang untuk memasuki wacana publik. Syaratnya adalah *pertama* mampu memahami makna pluralisme sebagai *sunnatullah* dan basis ontologi yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. *Kedua*, mampu memahami makna liberalisme sebagai penghargaan pada kebebasan dan otonomi individu. *Ketiga*, mampu memahami makna sekularisme sebagai keberbedaan antara ruang publik (negara) yang profan dengan ruang privat (agama) yang sakral. Tiga hal tersebut, akan membebaskan wacana Islam di Indonesia dari ortodoksi fundamentalisme dan romantisisme imajinasi idealisme kekhilafahan yang tidak mengikuti realitas perkembangan zaman dan situasi politik kebangsaan. Di sinilah pentingnya reinterpretasi misi dan peran gerakan Islam di Indonesia.

### **Transformasi Sosial sebagai Proses Menuju Peradaban Umat Islam Indonesia**

Untuk sampai pada peran Islam sebagai agama *prophetic* yang mencita-citakan sebuah model masyarakat muslim yang egaliter, manusiawi, terbuka, dan demokratis dibutuhkan suatu pendidikan karakter. Lewat pendidikan karakter diharapkan terjadi proses transformasi sosial budaya, yang pada hakikatnya adalah sebuah upaya yang terus-menerus dalam rangka peningkatan peradaban manusia. Dengan asumsi ini, maka orientasi transformasi sosial haruslah mencerminkan nilai-nilai universal dan egalitarian.

Secara etimologi, transformasi sosial bermakna sebagai perubahan bentuk dengan pertimbangan adanya perubahan karakter, kondisi, fungsi, alam, dan lain-lain.<sup>11</sup> Dalam pengertian sosiologi, transformasi sosial dimaksudkan sebagai perubahan secara menyeluruh, baik dalam bentuk maupun materi, dalam hubungannya dengan relasi manusia sebagai individu maupun kelompok. Transformasi sosial sering diartikan juga sebagai perubahan sosial yang

---

11 *The New Oxford Illustrated Dictionary*, 1978, hal. 1776.

membawa nilai-nilai positif dalam kerangka proses humanisasi lewat sarana pendidikan, penerapan teknologi, kebudayaan, dan gerakan sosial.<sup>12</sup>

Untuk membicarakan Agama Islam dalam kaitannya sebagai agama *prophetic*, tidak bisa dikatakan bahwa Agama Islam itu bersikap netral. Karena ketika agama itu bersikap netral hakikatnya ia telah memosisikan diri secara politik untuk mendekati elit kekuasaan dan tidak berpihak kepada pihak yang termarginalkan. Di sini agama harus menjadi landasan gerakan ideologi pembebasan. Dasar aksi bahwa agama Islam harus netral adalah ilusi dan hanya akan mengarah pada *status quo*. Karena hakikatnya sulit untuk mengubah kesadaran manusia, ketika struktur sosial yang membentuk kesadaran yang sakit, itu dibiarkan tetap utuh dan tak berubah. Mengubah struktur sosial merupakan prasyarat untuk membangkitkan kesadaran manusia, dan proses ini tidak akan terjadi secara otomatis dan mekanis, melainkan lewat suatu perjuangan yang serius, dan revolusi mental. Pandangan ini harus didukung oleh pendidikan keislaman di sekolah-sekolah, perguruan tinggi, bahkan pesantren-pesantren di Indonesia. Tidak dapat dibantah bahwa realitas dunia muslim saat ini, termasuk di Indonesia masih diliputi banyak problem, seperti problem ekonomi, sosial, budaya, dan politik; adanya ketidakadilan politik, diskriminasi gender, keterbelakangan pendidikan dan budaya, minimnya kesejahteraan hidup, disintegrasi, serta perpecahan antara berbagai kelompok yang saling bertikai dan konflik satu sama lain.

Jalan satu-satunya untuk keluar dari keterbelakangan seperti yang disebutkan di atas adalah lewat transformasi sosial. Transformasi sosial bisa dijalankan jika banyak agamawan terlibat secara nyata dengan kaum tertindas melalui khutbah-khutbah teologi politiknya yang mencela struktur kekuasaan yang memiskinkan kaum lemah. Kemiskinan struktural yang terus ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia, yang sebagian besar dialami oleh kaum muslim harus segera dihentikan dan dihancurkan. Kemiskinan struktural ini tidak dapat diubah hanya dengan menyuruh mereka orang-orang miskin untuk bekerja keras, atau mencari pen-

---

12 *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, 1991, hal. 442.

didikan, dan lain-lain, melainkan juga dengan mengubah koordinat-koordinat struktural yang membelenggu mereka secara sosial-politik. Di sini ada ketidakadilan baik secara sosial, ekonomi, dan bahkan politik. Agamawan harus berpihak kepada kaum lemah yang tidak mungkin bisa dilakukan dalam batas kesadaran internal dari mereka. Proses ini harus diletakkan dalam konteks nasional, dan keterlibatan agamawan dalam politik praktis yang berpihak kepada kaum yang terdzalimi merupakan suatu hal yang niscaya.

Dalam transformasi sosial terjadi proses dialektika, proses dialog, adaptasi, adopsi, dan seleksi terhadap kultur lain. Ini berarti terjadi perubahan cara pandang dan sikap beragama kita. Menurut Hassan Hanafi, agama harus dipandang sebagai ideologi (bukan ideologis) yang punya kekuatan dan sebagai sumber perubahan. Perubahan baru akan terwujud kalau individu dan masyarakat telah diyakinkan lewat suatu pencerahan terhadap paradigma beragama yang benar yang diajarkan di masjid, pesantren, sekolah, dan perguruan tinggi. Di negara seperti Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim, agama Islam masih punya kekuatan sebagai kendaraan menuju tujuan yang dicita-citakan oleh *founding fathers* bangsa ini. Untuk itu maka, masyarakat Islam Indonesia harus diubah dari berpaham konservatisme yang mencita-citakan formalisme syariah, menjadi masyarakat rasional, egaliter, demokratis, dan otonom.

Beragama adalah berteologi yang bersifat revolusioner. Revolusioner tidak sama dengan reaksioner. Menjadi teolog yang revolusioner berarti terus-menerus berusaha menentang penindasan, eksploitasi, dan kesewenang-wenangan. Penentangan ini dilakukan demi kebebasan dan kemerdekaan kaum tertindas, secara konkrit dan bukan sekedar idealisme ilusif. Teologi politik, peran *prophetic* agama semakin jelas terlihat, karena berteologi diterjemahkan sebagai refleksi kritis dan praksis untuk transformasi dunia. Tidak hanya membaca kembali sejarah dan kitab suci tetapi lebih dari itu adalah membentuk kembali sejarah. Syarat yang tak dapat ditawar adalah agama masuk dalam solidaritas dengan rakyat yang tertindas dan miskin. Dengan beragama apa yang ideal menjadi aktual, dan ilmu termanifestasi dalam tindakan. Begitulah

bertauhid dimaknai sebagai sebuah tindakan konkrit yang hanya bisa dimengerti dalam tindakan konkrit.<sup>13</sup> Jadi, peran *propethic* dari agama adalah mengedepankan konsep *anthropos* (kemanusiaan), dan bukan *theos* (ketuhanan), manusialah yang nantinya menjadi fokus dan objek kajian dengan berlandaskan pada kebebasan, persamaan, dan keadilan.

## Penutup

Agama Islam hakikatnya menuntut dua hal yang merupakan aspek *prophetic* dari agama. *Pertama* aspek keakhiratan (*other wordly religion*), yaitu terpenuhinya kekayaan spiritual yang menjadi urusan privat masing-masing yang menitikberatkan pada peribadatan (*mahdah*) untuk keselamatan di akhirat. *Kedua* yang tak kalah pentingnya adalah aspek keduniaan (*this wordly religion*), yaitu aspek sekuler agama yang berkepentingan terhadap perubahan menuju pada perkembangan mutu kehidupan manusia di dunia ini sebagai cermin kehidupan di dunia akhirat nanti. Gerakan agama Islam di Indonesia seharusnya mengacu pada keseimbangan tersebut, yaitu lewat upaya-upaya untuk mengungkapkan dan menampilkan ajaran-ajaran yang mendukung peningkatan aspek spiritualitas dan religiositas penganutnya di satu sisi, dan perubahan sosial, perbaikan kehidupan materi melalui pembangunan ekonomi, pengembangan teknologi, dan pengembangan kehidupan sosial budaya di sisi lain.

Peranan agama *prophetic* seperti ini memang mengandung resiko, setidaknya-tidaknya bagi pemerintah yang berorientasi kepada stabilitas politik dan keamanan, dan kurang memperhatikan aspek kesejahteraan spiritual dan material. Namun demikian, seiring dengan semakin membaiknya sistem demokrasi di Indonesia, semakin terbuka cakrawala untuk melakukan dialog yang kritis untuk membuka jalan kepada perumusan tentang *platform* bersama yang lebih luas untuk kesejahteraan rakyat. ❀

---

13 Lihat M. Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995, hal. 35.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Afadlal, dkk, *Islam dan Radikalisme di Indonesia* (ed. Endang Turmudi, Riza Sihbudi), Jakarta: LIPI Press, 2005.
- Fromm, Erich, *Religion and Psychoanalysis*, New York: Vail-Ballou Press Ins., 1997.
- Hamilton, Malcolm B, *The Sociology of Religion: Theoretical and Comparative Perspective*, London and New York: Routledge, 1995.
- Hanafi, Hassan, *Mina l-Aqidah ila Tsawrah, Vol. 1*, Kairo: Maktabah Madbouli, 1988.
- Kimbal, *Kala Agama Menjadi Bencana* (terj. Nurhadi), Bandung: Mizan, 2003.
- Raharjo, Dawam, *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah, dan Perubahan Sosial*, LP3S, LSAF, 1999.
- Griffin, David Ray, *God and Religion in the Postmodern World* (terj. A. Gunawan Admiranto), Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia, 1999.